

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Ali, Achmad dan Heryani Wiwie. 2012. *Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Amirudin dan Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT. TIKI Raja Grafindo Persada.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta : Rajawalipers.
- Asikin, Z. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asikin, Zainal. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta : Rajawalipers.
- Bambang, Kesowo. 2006. *Pengantar Umum Mengenai HKI di Indonesia*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka
- Dharmawan. Supasti. dkk. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Deepublish
- Etty Susilowati. 2010. *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Undip.
- Fajar, Mukti. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta.
- H. OK. Saidin, 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Hairi, W. M. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law*. Jakarta: Prenamitedia Group.

Lindsey Tim, dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni dan Asian Law Group Pty. Ltd.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nasution, Rahmi Janed Parinduri. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Setyowati, dkk. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soelistyo, Henry. 2017. *Badfaith Dalam Hukum Merek cet.II*. Yogyakarta: Maharsa Artha Mulia.

Sudjana. 2018. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: CV Keni Media

Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Sinar Grafika.

Yulia. 2015. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Aceh: Unimal Press.

Artikel Dalam Jurnal:

Assa, B. J. (2019). Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, Volume 7, Nomor 2.

Ardhya, S.N. (2017). Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (hlm. 127-146).

- Budiman, C. R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) Di Indonesia. *Reformasi Hukum*, Volume 23 (hlm.1-18).
- Charles Yeremia Far-Far, Sentot P. Sigito, dan M. Zairul Alam. (2014). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (GOOD FAITH) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 365K/Pdt.Sus-HaKI/2013), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.
- Dewi, L.K, & Landra, P.T.C. (2019). Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 3 (hlm.1-17).
- Dwipayani, D. M., & Fazriyah, N. (2021). *Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/Pn. Niaga. Jkt. Pst. Ganesha Law Review*, volume 3, Nomor 2 (hlm.97-110).
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Warta Dharmawangsa*, (56).
- Haryadi, R. E. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek terhadap Pelanggaran Merek Menurut UU Merek Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (hlm.124-130).
- Kusuma, I. A. C. D., & Sudantra, I. K. (2017). Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Pemilik Merek Di Indonesia Terhadap Pelanggaran Merek Dalam Bentuk Perjanjian Lisensi. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Mamarimbing, J. C. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Merek Dan Pemulihan Hak. *Lex Privatum*, Volume 7, Nomor 2.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1 (hlm.65-77).
- Nafiisah, T. (2021). *Pelindungan Hukum Pada Merek Terdaftar Berdasarkan Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20*

- Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), Volume 11, Nomor 2 (hlm.350-359).
- Prasetya, I.M.D, & Ariana, I.G.P. (2019). Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1 (hlm.1-14).
- Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (hlm.97-108).
- Putri, C. T., & Purwaningsih, E. (2019). *Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J. Casanova (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt. Sus/Hki/2016)*. *Adil Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 2.
- Safiranita, T., Putri, S. A., & Kusmayanti, H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal â€ œSEPHORAâ€ atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Merek*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9, Nomor 1 (hlm.112-121).
- Santoso, E. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 5, Nmor 1 (hlm.117-134).
- Saraswati, I.A.K.I.N, & R., Ibrahim. (2019). Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 4 (hm.1-15).
- Sari Adnyani. (2015). Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (hlm.68-80).
- Sari, I. N., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Atas Pelanggaran Merek Oleh Pihak Yang Bukan Pemegang Lisensi. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 5, Nomor 2.

Simangungsong, M., & Nababan, R. (2019). *Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No. 57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn. Niaga)*. *Jurnal Hukum Patik*, Volume 8, Nomor 1 (hlm.1-10).

Sudjatmiko, A. (2010). Prinsip hukum penyelesaian pelanggaran passing off dalam hukum merek. *Yuridika*, Volume 25, Nomor 1 (hlm.51-69).

Sujatmiko, A. (2010). Perjanjian Lisensi Merek Terkenal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 22, Nomor 2 (hlm.252-264).

Wijaya, K. Y. V., & Wairocana, I. G. N. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, Volume 6, Nomor 3.

Windari, D. (2014). Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan UU Merek Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 3, Nomor 3 (44128).

Yanwar, M. (2016). *Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perkara Pembatalan Merek Terdaftar (Studi Kasus Merek Pt. Krakatau Steel Dan Merek Pt. Perwira Adhitama Sejati)*. *Premise Law Journal*, Volume 6.

Skripsi:

Ermin Julia Irsalina. 2016. *Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan di Banyumas, Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Heny Desy Yanti Wijaya. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Berdasarkan Undang– Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur.

Kadek Briyan Sky Pinandita. 2021. *Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek*

Terdaftar Tanpa Lisensi di Wilayah Kabupaten Buleleng). Skripsi. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.

Rodhiyah Ratih Kumalasari. 2015. *PEMBATALAN MEREK DAGANG ORIORIO AKIBAT PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK OREO (Analisis Putusan NO. 402 K/Pdt.Sus/2011)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Siti Fatimah. 2020. *Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya Antara Pt Kalimantan Steel Melawan Pt Indo Metal Tech Products Dan Pd Berkat Jaya (Studi Putusan No 234 K/Pdt.Sus-Hki/2015)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Trias Rosita Fatmawati. 2010. *Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Pada Merek Kecap dan Makanan Terdaftar*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Internet:

Amrikasari, Risa. 2019. “Adakah Perlindungan Hukum atas Merek yang Belum Terdaftar?”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-perlindungan-hukum-atas-merek-yang-belum-terdaftar-lt5d2360e147632> (diakses pada tanggal 1 Oktober 2021)

Pramesti, Tri Jata Ayu. 2020. “Arti ‘Persamaan Pada Pokoknya’ Dalam UU Merek Dan Indikasi Geografis”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945> (diakses pada tanggal 1 Oktober 2021)

Pratama, Exza. 2019. “Cara Menghindari ‘Persamaan Pada Pokoknya’ Dalam Merek”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghindari-persamaan-pada-pokoknya-dalam-merek-lt5c1e84e7cce5b> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2021)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84).

